

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Miswar. S

NPP. 32.0894

Asdaf Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: miswar1203@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The ineffective utilization of population data and verification and validation of population data in the distribution of social assistance for the poor has not been carried out periodically in Jeneponto Regency.* **Purpose:** *This study aims to determine the effectiveness of the utilization of population data in the distribution of social assistance for the poor in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province.* **Method:** *The research method used by the author in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Result:** *The results of the study indicate that the utilization of population data in the distribution of social assistance in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province has not been effective.* **Conclusion:** *Some of the obstacles faced are inconsistencies in population data, lack of public awareness, and manipulation. Efforts made to overcome these obstacles include periodic data validation and verification by coordinating with the Population and Civil Registration Service of Jeneponto Regency, Increasing socialization and coordination by educating the community and PKH assistants about the importance of updating population data, and Facilitating the processing of population documents.* **Keywords:** *Population Data, Effectiveness, Social Assistance, Poor Community, Jeneponto*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Belum efektifnya pemanfaatan data kependudukan dan verifikasi dan validasi data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin belum dilakukan secara berkala di Kabupaten Jeneponto.* **Tujuan:** *penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.* **Metode:** *Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.* **Hasil/Temuan:** *Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Jeneponto Provinsi*

Sulawesi Selatan belum berjalan efektif. **Kesimpulan:** Beberapa hambatan yang dihadapi berupa ketidaksesuaian data kependudukan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta manipulasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain Validasi dan verifikasi data secara berkala dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan pendamping PKH mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan, dan Mempermudah pengurusan dokumen kependudukan.

Kata Kunci: Data Kependudukan, Efektivitas, Bantuan Sosial, Masyarakat Miskin, Jeneponto

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional (R. Haitami Lutfiatus Sahlah et al., 2021). Kemiskinan sering kali menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Nugroho et al., 2025). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak dapat diabaikan. Jumlah penduduk miskin setiap tahunnya tidak berkurang (Nurdiansyah et al., 2025). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03%. Angka ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya telah diupayakan untuk menekan jumlah keluarga miskin (Sriliana et al., 2025). salah satu program tersebut adalah program bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Permasalahan inti yang sering terjadi dalam pemberian bantuan sosial dari pemerintah adalah pembaharuan data, keakuratan data serta waktu pembagian bantuan sosial yang selalu tidak terlaksana dengan baik, baik dari segi sasaran maupun waktu (Teja, 2020). Ketidaktepatan data menjadi kendala yang menyebabkan bantuan tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau bahkan salah sasaran (TNP2K, 2020).

Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Jeneponto, masih terdapat tantangan dalam memanfaatkan data kependudukan secara maksimal untuk mendukung program bantuan sosial. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan tingkat kemiskinan di Jeneponto dari 15,49% pada tahun 2022 menjadi 13,06% pada tahun 2023, persentase kemiskinan di Jeneponto tetap salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan data di lapangan seringkali menunjukkan disparitas yang signifikan. Kurangnya akurasi dan ketersediaan data *real-time* mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat membuat penargetan penerima manfaat program bantuan sosial kurang efektif. Akibatnya, tidak semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat terakomodasi dengan baik.

Data kependudukan sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, termasuk pembuat kebijakan, kalangan pendidikan, dan masyarakat umum, karena data tersebut memainkan peran penting dalam pengelolaan penanggulangan permasalahan kependudukan saat ini (Hutasoit, 2017). Data kependudukan yang

valid, seperti akta kelahiran, e-KTP, dan Kartu Keluarga (KK), menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Validitas data menjadi sangat penting agar bantuan sosial yang diberikan dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap program bantuan sosial secara lebih akurat dan tepat sasaran. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya data kependudukan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Namun, belum banyak studi yang fokus pada peran data kependudukan dalam mendukung distribusi bantuan sosial, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Kabupaten Jeneponto. Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana data kependudukan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses identifikasi dan penyaluran bantuan sosial.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengukur efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penggunaan data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial. Penelitian I Wayan Tagel Winarta, Anak Agung Gede Raka, dan I Made Sumada berjudul Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar (I Wayan Tagel Winarta, 2020), menemukan bahwa kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Gianyar masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masyarakat terus mengajukan permohonan bantuan, meskipun tidak banyak. Penelitian Cecelia Daicy Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar berjudul Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa (Sasuwuk et al., 2021), menemukan bahwa program BLTDD masih tidak berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi selama pelaksanaannya. Penelitian Nanang Suparman, Ghina Washillah, dan Tedi Juana berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Suparman et al., 2021), menemukan bahwa efektivitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dana belum diberikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat, pemerintah desa tidak transparan, dan sasaran yang tidak tepat untuk penerima dana BLT. Tetapi, manfaat BLT-DD, masih dirasakan, terutama oleh keluarga penerima bantuan. Penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar berjudul Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara (Pratiwi, 2022), menemukan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Batu Bara, khususnya Dinas Sosial, telah dilakukan sesuai prosedur. Namun, ada beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan, seperti banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, pendataan harus selalu disesuaikan dengan informasi aktual. Penelitian Dezzi Lasari dan Helmi Ali berjudul Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtk) dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam (Lasari & Ali, 2024), menemukan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan DTKS

yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dinas Sosial juga telah menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan data DTKS untuk penyaluran bantuan sosial.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang seharusnya berjalan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Duncan (Streers, 1985) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan data kependudukan dan mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni metode penelitian yang bertumpu pada filsafat post-positivisme untuk meneliti suatu objek yang alamiah, (lawan katanya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan indikator utama (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/(pengumpulan), dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi Peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, pegawai fungsional Dinas Sosial, pegawai fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dua orang tim pendamping PKH, dan enam orang penerima program bantuan

sosial. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan penguasaan terkait penelitian yang dilakukan yaitu Dinas Sosial, tim pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan informasi terkait pemanfaatan data kependudukan. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas oleh Duncan (Streers, 1985) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di tiga lokasi penelitian, yakni Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, dan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto menggunakan teori efektivitas menurut Duncan yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

- a. Pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial belum efektif

Peneliti melakukan pengukuran terhadap efektivitas pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan wawancara terhadap para informan ditemukan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran, karena penggunaan data yang digunakan dalam DTKS yang telah diverifikasi melalui Dinas Dukcapil masih menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh perubahan data kependudukan seperti pindah domisili, perubahan status keluarga, kematian yang tidak dilaporkan, dan masyarakat yang tidak memperbarui data kependudukan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

- b. Hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Faktor penghambat utama dalam pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidaksesuaian data akibat perubahan alamat, status keluarga, atau belum melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, adanya data ganda atau tidak aktif juga masih menjadi kendala dalam memastikan akurasi penerima bantuan sosial. Hambatan kedua, kurangnya kesadaran masyarakat miskin dalam melaporkan perubahan status kependudukannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data yang tercantum dalam sistem menjadi tidak akurat. Hambatan berikutnya, yaitu manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanipulasi data mereka agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Berdasarkan hasil uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi DTKS memastikan validasi data penerima bantuan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dan perbaikan rutin setiap bulan. Namun, terdapat hambatan-hambatan seperti ketidaksesuaian data kependudukan karena keterbatasan dalam memperbaiki data tanpa laporan dari pihak bersangkutan dan risiko kesalahan jika perubahan dilakukan tanpa verifikasi langsung, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan, dan manipulasi data. Hal ini menjadi penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan kesadaran masyarakat penerima bantuan sosial untuk memperbarui data kependudukan, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto sebagai pihak pelaksana penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang didapatkan, upaya yang dilakukan oleh dinas sosial seperti validasi dan verifikasi data secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan seperti data ganda, NIK tidak aktif, atau perubahan status kependudukan yang belum dilaporkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

- d. Penyaluran bantuan sosial telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dengan pencairan bantuan yang dilakukan dalam waktu 20–25 hari setelah Surat Keputusan diterbitkan. Meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam beberapa kasus, namun penyaluran bantuan tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh penyebaran informasi terkait penyaluran bantuan sosial yang diperoleh secara mudah melalui gawai yang dimiliki.

- e. Pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dinas Dukcapil hanya bertindak sebagai penyedia data untuk verifikasi dan validasi data kependudukan sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab atas proses pemilihan penerima manfaat bantuan dan penyaluran bantuan berdasarkan data yang telah divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.2. Integrasi

- a. Adanya sosialisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto

Sosialisasi merupakan faktor krusial dalam memastikan efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Proses ini berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta aparat desa atau kelurahan mengenai prosedur pembaruan, verifikasi, dan validasi data

kependudukan yang digunakan dalam sistem bantuan. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pendataan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan, namun partisipasi dan keterlibatan masyarakat masih kurang dalam memperbarui data masih menjadi tantangan. Beberapa warga cenderung tidak melaporkan perubahan status ekonomi atau kependudukan mereka, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.

- b. Pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan prosedur yang berlaku

Prosedur dalam penyaluran bantuan sosial berperan penting dalam memastikan pemanfaatan data kependudukan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tahap, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga distribusi bantuan, harus dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan penerima manfaat. Mekanisme yang jelas juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Pemanfaatan data kependudukan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, di mana setiap penerima bantuan sosial harus melalui proses verifikasi data kependudukan sebelum masuk dalam data DTKS. Sistem ini membantu dalam memastikan bahwa bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan.

Prosedur pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui berbagai tahapan yakni:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Jeneponto melalui Disdukcapil Kabupaten Jeneponto;
2. Bupati Kabupaten Jeneponto melalui Disdukcapil Kabupaten Jeneponto meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan kemudian melakukan penandatanganan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto
3. Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Sosial berupa akses NIK secara online ataupun penggunaan card reader KTP-el untuk melakukan validasi data kependudukan pemohon layanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya digunakan dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan dalam DTKS.

3.3. Adaptasi

- a. Adanya pelatihan bagi operator layanan

Kebutuhan terkait peningkatan kemampuan sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selain memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan dari suatu kegiatan, juga sebagai penentu keberhasilan suatu kegiatan yang efisien dan efektif. Peningkatan kemampuan yang dimaksudkan dalam pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial adalah pelatihan terhadap operator layanan dalam penggunaan aplikasi DTKS. Dinas Sosial telah menyediakan pelatihan bagi operator pelayanan untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola data kependudukan. Pelatihan tidak hanya diberikan

kepada operator aplikasi DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, tetapi juga pada tingkat kelurahan/desa untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

b. Sarana dan prasarana penunjang

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan suatu program atau kegiatan pemerintah, salah satunya dalam pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Berdasarkan wawancara dengan para informan dan observasi lapangan yang telah dilakukan ditemukan bahwa sarana dan prasarana dalam pengelolaan data kependudukan di Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil sudah cukup memadai dengan ketersediaan komputer di bagian pelayanan Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik untuk mengoperasikan aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun masih di perlukan optimalisasi dalam integrasi sistem digital untuk mempermudah akses dan validasi data penerima bantuan sosial. Akses aplikasi DTKS disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, sementara sarana di tingkat kelurahan dan desa menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengukur efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan data kependudukan tersebut. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, apabila ditinjau dari indikator pencapaian tujuan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan seperti ketidaksesuaian data kependudukan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan manipulasi data yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian data kependudukan, kesadaran masyarakat, dan data yang valid sangat penting dalam menunjang efektifnya pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti, sama halnya dengan temuan penelitian oleh I Wayan Tagel Winarta, Anak Agung Gede Raka, dan I Made Sumada (I Wayan Tagel Winarta, 2020), Cecelia Daicy Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar (2021), Nanang Suparman, Ghina Washillah, dan Tedi Juana (2021), Dezzi Lasari dan Helmi Ali (2024) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial masih menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian data dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait program bantuan sosial serta manipulasi data. Berbeda dengan penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) yang menemukan bahwa penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan dengan cukup baik, di mana proses administrasi, sosialisasi, dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dari pemerintah pusat, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan bahwa sosialisasi telah dilakukan dengan baik, sama halnya dengan penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan

diterima langsung oleh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Berbeda dengan penelitian Cecelia Daicy Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi program masih terbatas pada tokoh masyarakat karena pembatasan pandemi.

Secara keseluruhan, kesesuaian dan validitas data kependudukan yang digunakan memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Apabila pemanfaatan data kependudukan berjalan dengan efektif, maka penyaluran bantuan sosial akan terlaksana secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan koordinasi secara bertahap antara dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan masyarakat untuk mendukung program bantuan sosial.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa secara garis besar pemanfaatan data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah, pembangunan, dan perencanaan aksi masyarakat, salah satunya dalam menunjang penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi oleh peneliti, salah satunya masih ada saja ditemukan masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga dimensi teori Efektivitas menurut Duncan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Penyaluran Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Jeneponto belum berjalan dengan baik. Beberapa hambatan yang diidentifikasi oleh peneliti, yakni ketidaksesuaian data kependudukan yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial berisiko tidak terlaksana dengan baik dan benar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kurangnya kesadaran masyarakat, dimana banyak warga yang tidak dengan segera melaporkan perubahan status kependudukan mereka ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga data yang tercantum dalam sistem menjadi tidak akurat, dan manipulasi data yang dapat menimbulkan ketidaktepatan data dan berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, yakni validasi dan verifikasi data secara berkala dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk memperbarui dan memverifikasi data keluarga penerima manfaat, meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan pendamping PKH mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan, dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dengan mengajukan perbaikan data kependudukan ke pemerintah pusat agar mempercepat proses perbaikan data bagi calon penerima manfaat yang mengalami kendala administratif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan

penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. In *Alfabeta* (p. 194). Alfabeta.
http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku_imelda.pdf
- I Wayan Tagel Winarta, A. A. G. R. dan I. M. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Jurnal Mirai Management Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 2024–2036.
- Nugroho, S., Rini, D. S., Novianti, P., Crisdianto, R., Karuna, E. E., & Fairuzindah, A. (2025). Analysis of the Existence of the Agricultural Sector in Modeling Poverty in Bengkulu Province Using Gaussian Copula Marginal Regression. *Barekeng*, 19(2), 1251–1262.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss2pp1251-1262>
- Nurdiansyah, D., Novitasari, D. A., Ridho, S. L. Z., Utomo, M. C. C., & Oktafiya, D. P. N. (2025). Implementation of the Sem-Pls Approach To Analyze the Impact of Social Aid and Apbd on Poverty in the Bojonegoro District. *Barekeng*, 19(1), 525–536.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss1pp525-536>
- Pratiwi, D. C. (2022). *Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara*. 4(12), 5684–5690.
- R. Haitami Lutfiatus Sahlah, Ermaya Suradinata, & Sampara Lukman. (2021). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 391–400. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.441>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35089/32872>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sriliana, I., Nugroho, S., Agwil, W., & Sihombing, E. D. (2025). Evaluation of Multivariate Adaptive Regression Splines on Imbalanced Dataset for Poverty Classification in Bengkulu Province. *Barekeng*, 19(2), 1143–1156.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss2pp1143-1156>
- Streers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Airlangga.

- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19 (Issues of Accuracy of Recipients of COVID-19 Social Assistance). *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, 13–18. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-18-II-P3DI-September-2020-242.pdf
- TNP2K. (2020). Ringkasan Kebijakan: Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. *Tnp2K*, 1–12. https://www.tnp2k.go.id/download/84PB_11_Kecukupan_BansosR2.pdf

